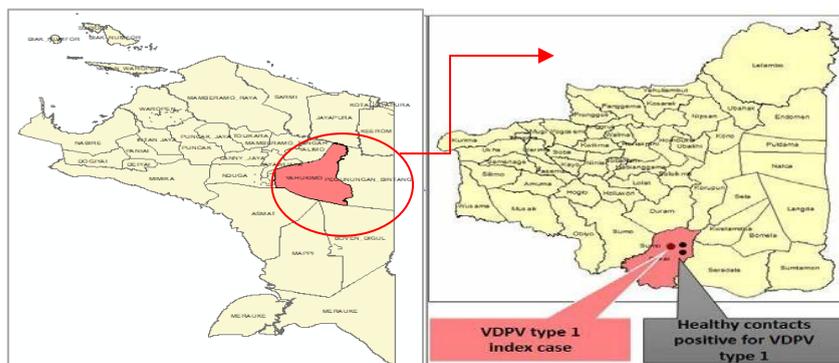


Laporan Situasi KLB cVDPV1 di Indonesia #17

01 November 2019

Hanya untuk sirkulasi internal

cVDPV1 cases in Papua Province, Indonesia, 2018-2019



Sorotan Mingguan

- Tidak ada kasus VDPV baru yang dilaporkan di minggu ini-epi no 43.
- Pada 17 Oktober 2019, Global Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication mengumumkan bahwa “**poliovirus liar tipe 3 (WPV3)**” telah dimusnahkan di seluruh dunia (<http://polioeradication.org/news-post/two-out-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated>)
- Rotary District 3410 mengadakan End Polio Walk untuk merayakan Hari Polio Sedunia pada 27 Oktober 2019 di Bundaran HI, Jakarta. Sekitar 400 orang dari kalangan masyarakat, lintas-sektoral, WHO dan UNICEF bergabung dengan acara ini untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap eradikasi polio.
- Buletin bulanan terkait surveilans PD3I dan imunisasi di Papua dan Papua Barat telah dikembangkan pada awal bulan ini.
- DKP Papua Barat mengadakan rapat imunisasi dan surveilans untuk staf DKK, rumah sakit dan dokter anak pada 22-24 Oktober 2019 di Kota Sorong. Total peserta mencapai 53 orang (dari 13 Kota/Kabupaten) dengan narasumber dan fasilitator dari DKP, WHO dan UNICEF Indonesia. Rapat ditutup dengan kesepakatan dan tindakan lanjut untuk mencapai kualitas tertinggi surveilans PD3I dan memperkuat imunisasi rutin. Pada tahun ini, backlog fighting hanya akan dilaksanakan di puskesmas kabupten Maybrat dan Manokwari sementara sisanya akan dilaksanakan pada 2020.
- Dalam kurun waktu dua minggu setelah dilanjutkan, 40 desa lain di kabupaten Yahukimo berhasil mencapai 12 titik pendaratan melalui program operasi khusus. Untuk saat ini data belum dikompilasi dan dianalisis serta akan dilaporkan ke masing-masing DKK dan DKP pada minggu depan. Sejumlah tantangan yang ditemui diantaranya berkaitan dengan kerusakan politik di dataran tinggi Papua. Penolakan vaksin di sejumlah masyarakat disebabkan oleh rasa takut yang tinggi dan ketidakpercayaan terhadap layanan.
- Berbagai upaya untuk mencegah potensi transmisi cVDPV2 dari Filipina telah dilaksanakan. WHO memindahkan 2 stafnya untuk ditempatkan di provinsi yang berbatasan dengan Filipina, yaitu Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Salah satu staf juga dipindahkan ke Sulawesi Selatan yang sering dilalui pelayaran internasional. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan imunisasi rutin dan surveilans AFP. Kunjungan lapangan ke provinsi tersebut dilaksanakan oleh konsultan nasional WHO dan CDC untuk memperkuat dukungan.
- Kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat tetap menjadi masalah yang menunda kegiatan respons KLB.
- Papua memiliki NP AFP rate tahunan sebesar 4.08 dengan spesimen adekuat sebesar 52.1 % sedangkan Papua Barat memiliki NP AFP rate tahunan sebesar 6.78 dengan spesimen adekuat sebesar 52.4%

Ringkasan

Kasus cVDPV1 baru minggu ini: 0

Total kasus cVDPV1:1

Total anak sehat positif dengan VDPV1: 2

Grade KLB: 1

Deteksi terakhir: 13 Feb 2019

Detail Kasus

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia: 31 bulan

Mulai Kelumpuhan: 27 Nov 2018

Status Vaksinasi: 0 dosis

Area Terinfeksi

Kecamatan Dekai

Kabupaten Yahukimo

Provinsi Papua

Respon KLB

Dimana: Provinsi Papua dan Papua Barat

Siapa: Seluruh anak usia 0 sampai kurang dari 15 tahun

Target: 1.26 juta anak

Jenis Vaksin: bOPV

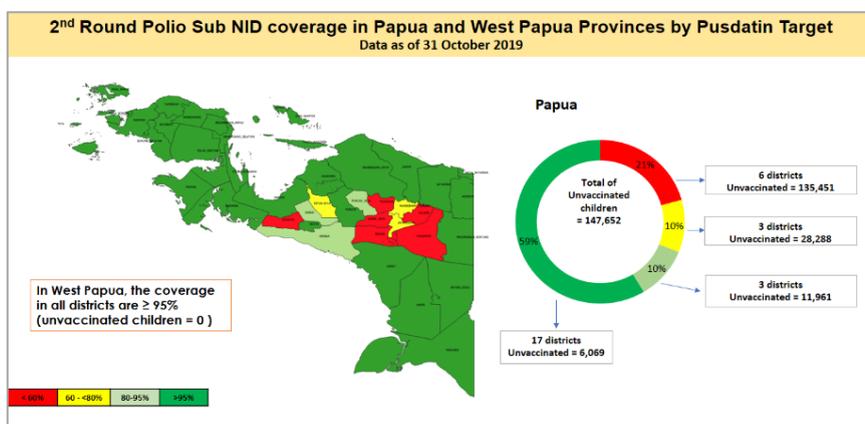
Sub PIN

- Sub PIN putaran 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan di provinsi Papua Barat. Seluruh (**13 Kabupaten**) melaporkan pencapaian yang sama tinggi $\geq 100\%$.
- Pada Sub PIN putaran 1 di provinsi Papua, 11 dari 29 Kab/Kota mencapai cakupan sebesar 95%. Sementara, cakupan di tiga kabupaten mencapai lebih dari 80%. Lima belas kabupaten dilaporkan memiliki cakupan kurang dari 80%, termasuk Kabupaten Yahukimo dengan cakupan yang dilaporkan mencapai 19%.
- Sub PIN putaran 2 diperpanjang di daerah terpencil seperti Kabupaten Nduga. DKP Papua melaksanakan lokakarya pertama di Kabupaten Nduga pada 24 Oktober 2019 untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dan relawan gereja terkait imunisasi. Sampai 31 Oktober, cakupan Papua dilaporkan mencapai 84.90% (berdasarkan Pusdatin atau target proyeksi nasional). Cakupan berdasarkan perkiraan populasi target lokal mencapai **92.18%**. Dengan menggunakan perkiraan populasi target lokal, **24** (15 di dataran rendah, 9 di dataran tinggi) dari 29 daerah dilaporkan memiliki cakupan setidaknya **80%**. Dari **24 daerah** tersebut, **20 daerah** mencapai lebih dari 95%.
- Strategi khusus tengah dilaksanakan untuk mencapai sisa 10-15% dari target anak, khususnya di daerah dataran tinggi, melalui *sweeping*, mengintensifkan kepemimpinan politik, serta koordinasi dan kerjasama antar kementerian.
- Sampai 24 Oktober 2018, 65 RCA baru dengan menggunakan alat RCA yang dimodifikasi telah dilaksanakan di provinsi Papua. Sebanyak 4,984 anak-anak berusia 0-15 tahun berhasil dinilai dan 84% dari mereka ditemukan menerima 2 dosis OPV secara beruntun di kedua putaran kampanye.
- Provinsi Papua Barat melaksanakan 58 RCA di 13 daerah setelah penyelesaian vaksinasi putaran kedua. Sebanyak 2,783 anak-anak berusia 0-15 tahun berhasil dinilai dan 97.7% dari mereka ditemukan telah divaksinasi. Penyebab utama anak-anak di Papua Barat melewatkan vaksinasi adalah orangtua sedang bepergian atau anak sedang sakit. Di Papua, 107 RCA berhasil diselesaikan selama putaran kedua dari 4 daerah dataran tinggi dan 11 daerah dataran rendah. Sebanyak 5,618 anak-anak berhasil dinilai dan 88.8% dari mereka ditemukan telah divaksinasi. Di Papua, penyebab utama anak-anak melewatkan vaksinasi adalah anak/wali sedang bepergian, kurangnya informasi mengenai kampanye, dan jarak/lokasi dari titik vaksinasi.

Kesiapsiagaan Polio di Provinsi Berisiko Tinggi Lainnya (selain Papua)

Indonesia memiliki 2 provinsi yang berbatasan dengan Filipina: Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Sulawesi Selatan juga termasuk karena sering dilalui pelayaran internasional. Kegiatan antisipatif sehubungan dengan potensi transmisi cVDPV2 dari Filipina diantaranya adalah:

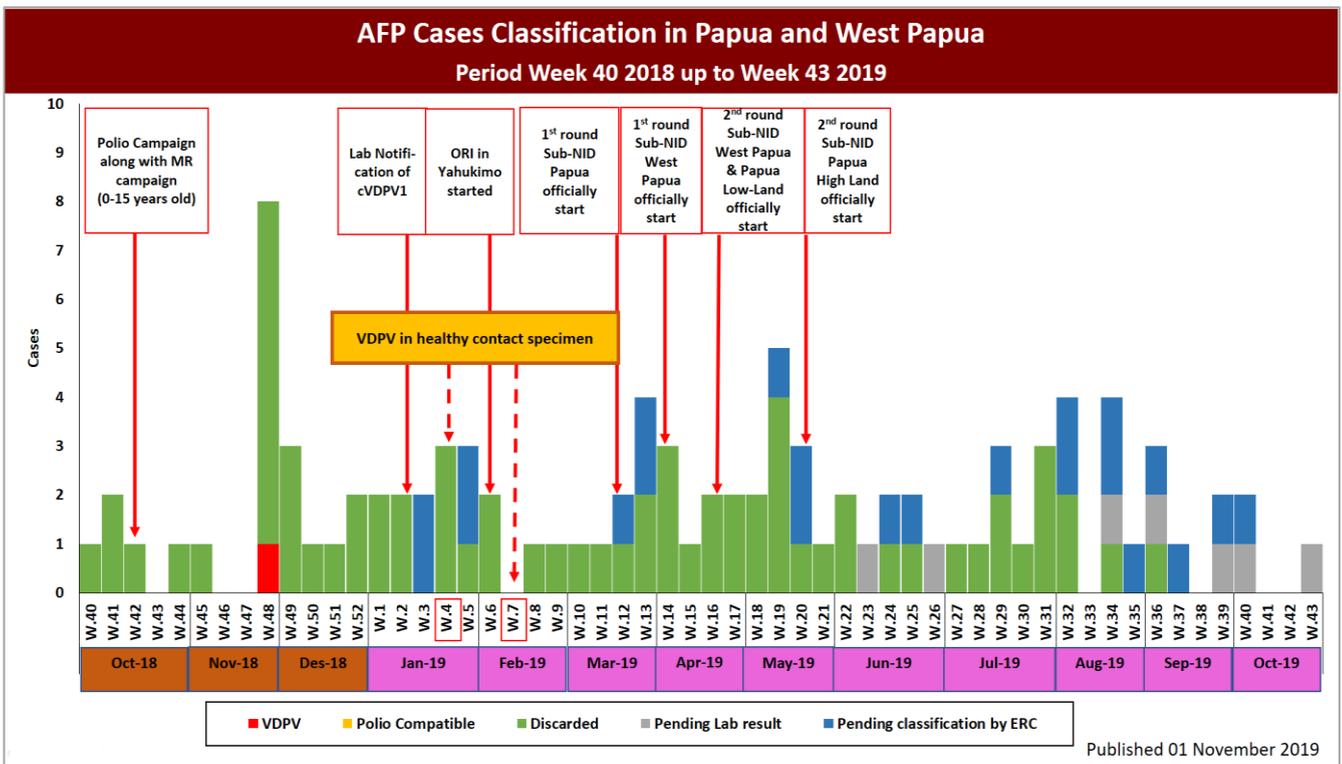
- Rapat peninjauan imunisasi dan surveilans dilaksanakan di tingkat provinsi dan Kab/Kota di Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara dengan dukungan GAVI dan anggaran daerah. Hasil peninjauan tersebut menyoroti pentingnya percepatan imunisasi rutin OPV dan IPV di bulan selanjutnya, serta meningkatkan temuan kasus AFP di daerah yang belum pernah melaporkan kasus AFP.
- Rapat koordinasi untuk membahas surveilans AFP dan *defaulter tracking* dilaksanakan di Puskesmas Sopi, Kabupaten Pulau Marotai, Provinsi Maluku Utara pada 29 Oktober 2019. Pesertanya terdiri dari dokter, petugas surveilans, coordinator bidan dan kepala program imunisasi. Hasil rapat adalah kesepakatan dan tindak lanjut untuk mencapai surveilans AFP yang berkualitas dan memperkenalkan vaksin IPV pada minggu depan di Posyandu serta memberikan vaksin IPV kepada anak-anak yang belum divaksinasi pada tahun kelahiran antara 2016-2019.
- Rapat koordinasi untuk membahas vaksinasi terus dilaksanakan oleh DKP Sulawesi Utara pada 14 Oktober 2019. Pesertanya terdiri dari staf Garuda Indonesia (penyedia penerbangan dari Manado ke Davao, Filipina), Kantor Kesehatan Pelabuhan Manado, kantor imigrasi dan ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies). Hasil rapat adalah kesepakatan dan tindak lanjut untuk memperkuat vaksinasi IPV bagi turis dari/ke Filipina.
- Vaksinasi IPV untuk anak-anak di bawah 5 tahun yang melewatkan jadwal IPV saat imunisasi rutin dilaksanakan di Kabupaten Sangihe dan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.
- Rapat koordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Pangkep, Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada 19 Oktober 2019. Terdapat Pelabuhan Biring Kassi sebagai pelabuhan khusus PT Tonasa untuk mengambil semen dan kedatangan kapal-kapal asing. Mereka memberitahukan bahwa tidak ada kapal Filipina yang memasuki pelabuhan ini selama 2 tahun, tetapi 2 minggu lalu terdapat 2 kapal Filipina yang masuk untuk mengambil semen. Mereka mengatakan bahwa seluruh proses pengangkutan semen dilakukan oleh mesin dan seluruh kru tetap di atas kapal. Hasil rapat adalah kesepakatan dan tindak lanjut untuk melaksanakan vaksinasi ketika kapal Filipina tiba.



Kiri : 17 daerah di Papua dan seluruh daerah (13) di Papua Barat memiliki cakupan SNID polio hingga $>95\%$ berdasarkan target Pusdatin
Kanan: Dua petugas EPI menyiapkan sesi imunisasi di puskesmas Provinsi Sulawesi Utara. Kredit: Dr. Olivii/WHO Indonesia..

Ringkasan Surveilans

- Pada tahun 2018, Non Polio Acute Faccid Paralysis (NP AFP) di Indonesia sebesar **2.42** dengan spesimen adekuat sebesar **78.4%**. Sembilan dari 34 provinsi memenuhi kedua indikator utama surveilans AFP: >2 atau lebih kasus AFP non-polio per 100.000 anak di bawah usia 15 tahun dan >**80** persen kasus AFP dengan spesimen yang adekuat.
- Pada minggu ke-43 2019, tingkat NP AFP tahunan Indonesia adalah **1.75** dengan spesimen adekuat sebesar **79.6%**.
- Pada minggu ke-43 2019, provinsi Papua memiliki tingkat NP AFP tahunan sebesar **4.08**, spesimen adekuat sebesar **52.1%** dengan 24 kasus AFP masih dalam klasifikasi pending. Papua Barat memiliki tingkat NP AFP tahunan sebesar **6.78**, spesimen adekuat sebesar **52.4%** dengan 5 kasus AFP masih dalam klasifikasi pending.
- Surveilans aktif dan pelaporan kasus AFP terus meningkat di kedua provinsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, di kedua provinsi tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal pelaporan dan investigasi kasus yang tepat waktu. Peningkatan pengumpulan spesimen yang tepat waktu dan memadai adalah prioritas bagi kedua provinsi.
- Ulasan Rekam Medis Rumah Sakit (HRR) di 12 provinsi berisiko tinggi terus berlanjut. Rumah sakit yang telah dilakukan HRR di Papua adalah 35/35 dan di Papua Barat adalah 19/19.
- Pengambilan sampel surveilans lingkungan (ES) di tahun 2019, di Papua telah diambil 19 sampel dari 8 lokasi berbeda di 3 kabupaten yaitu Kota Jayapura, Jayapura dan Yahukimo. Hasil pengujian menunjukkan negatif untuk 17 sampel dan 2 lainnya masih dalam proses. Sedangkan di Papua Barat telah diambil 2 sampel dari Manokwari yang hasilnya masih dalam proses.



Kiri: HRR di RS Chasan Boesoirie oleh petugas surveilans DKK Ternate sebagai upaya penemuan kasus AFP. Kredit: Hermansyah/WHO Indonesia. Kanan: Vaksinasi polio diberikan kepada anak di bawah 15 tahun di pasar, Kabupaten Nduga (daerah dataran tinggi), Papua. Kredit: Jose/GKI Nduga.

Mobilisasi Dukungan yang Optimal

Kementerian Kesehatan

- Kementerian Kesehatan Indonesia terus mengirim pakar senior ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendukung perencanaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi kegiatan respons polio.
- Telah dikeluarkannya surat edaran mengenai prosedur imunisasi IPV pada anak usia 4-36 bulan yang belum pernah mendapatkan imunisasi IPV serta cara pencatatan dan pelaporan.
- Telah dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen mengenai transmisi cVDPV di Filipina telah dikirimkan ke seluruh provinsi pada September 2019.

WHO

- WHO telah membuka kantor cabang di Jayapura, Provinsi Papua dan merekrut 10 petugas nasional untuk mendukung kegiatan di Papua dan Papua Barat. Para Petugas tersebut ditempatkan ke daerah dengan risiko tinggi untuk bekerja secara langsung dengan dinas kesehatan kota/kabupaten.
- Dikarenakan isu keamanan di Papua dan transmisi cVDPV2 yang baru-baru ini terjadi di Filipina, 2 petugas nasional telah ditempatkan ulang ke provinsi yang berbatasan dengan Filipina yaitu Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Seorang petugas telah dipindahkan ke Sulawesi Selatan yang sering dilalui oleh pelayaran internasional. Selain itu, dua petugas nasional juga dipindahkan ke Manokwari, Papua Barat dan Merauke, Papua. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan imunisasi rutin dan surveilans AFP. Kunjungan lapangan ke provinsi tersebut telah dilaksanakan oleh konsultan nasional WHO dan CDC untuk memperkuat dukungan.
- Dua asisten data tambahan telah bergabung dengan tim polio WHO, dengan satu orang ditempatkan di Jayapura dan satu lagi di kantor Jakarta untuk memperkuat analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti.

UNICEF

UNICEF melalui GAPAI dan YP2KP merekrut 22 petugas lapangan yang telah ditempatkan di 12 daerah dataran tinggi di Papua. Petugas lapangan ini akan bertanggung jawab membantu daerah untuk mencapai 95% cakupan, mengembangkan strategi mobilisasi sosial yang sesuai dengan konteks lokal, meningkatkan keefektifan manajemen vaksin dan rantai dingin, serta melaksanakan RCA.

Lain-Lain

- Rotary terus menyediakan kaos, topi, pin, buku, dan bahan KIE lainnya ke banyak kabupaten di provinsi Papua.
- Relawan Palang Merah Indonesia telah memberikan dukungan untuk putaran respons KLB di Jayapura baik sebagai pemberi vaksin dan penggerak masyarakat.
- Kantor CDC Indonesia telah memperkuat dukungan mereka untuk operasi penanggulangan KLB melalui Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Sembilan titik fokus kota/kabupaten sekarang sudah tersedia dan telah secara aktif mendukung HRR dan Penilaian Kesiapan Sederhana. Satu konsultan internasional CDC saat ini berada di Jakarta untuk mendukung respons KLB.



Sekitar 400 orang mengikuti End Polio Walk dengan diiringi pertunjukan Drum Band, Ondel-Ondel dan Pencak Silat Betawi Beksi dari Rotary. Kredit: Fina Tams/WHO Indonesia.

Koordinasi

- Kementerian Kesehatan terus memimpin dan mengoordinasikan dukungan pemerintah dan mitra untuk semua kegiatan penanggulangan wabah polio. Pertemuan mingguan di tingkat nasional dan provinsi membantu untuk mengoordinasikan kegiatan dan memantau pelaksanaan rencana tanggap KLB polio di tingkat lokal.
- Perwakilan senior Menteri Kesehatan (Penasihat Menteri Kesehatan) telah ditunjuk untuk secara langsung mendukung respons wabah polio Indonesia dan melakukan perjalanan mingguan ke Jayapura, Papua untuk bekerja melalui isu anggaran dan operasional.
- Berbagai upaya sedang berlangsung untuk memaksimalkan dukungan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri yang secara aktif bekerja untuk memastikan semua respon pemerintah terhadap KLB yang terjadi.
- Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat (PHEOC) yang bertempat di Jayapura telah didirikan dan beroperasi penuh.
- Konferensi video bersama WHO/UNICEF antara tim nasional dan provinsi dari Papua dan Papua Barat terus diadakan setiap minggu.
- Pertemuan mitra Polio, yang dipimpin oleh WHO, dilakukan setiap 2 minggu. Yang terakhir adalah pertemuan ke-28 pada 24 Oktober 2019.
- Rotary International dan IFRC/PMI terus memberikan dukungan yang berharga dalam memobilisasi komunitas lokal yang bekerja dengan LSM lokal dan kelompok gereja untuk menyadarkan dan membangun permintaan untuk vaksinasi polio..

Langkah Selanjutnya

- Respons KLB cVDPV1 yang baru dan rencana keberlanjutannya masih dalam proses pengembangan.
- Kemenkes dan DKP akan mendukung para mitra untuk meningkatkan pengawasan terhadap kemajuan cakupan Sub PIN putaran 2 di Papua dan untuk memastikan target indikator surveilans AFP terpenuhi.
- Pot spesimen, poster AFP, dan folder advokasi polio telah didistribusikan ke semua kabupaten di Papua/Papua Barat dan juga ke semua provinsi berisiko tinggi di Indonesia.
- Pedoman surveilans AFP sedang difinalisasi oleh Kemenkes.
- Rapat untuk memperkuat imunisasi polio dan surveilans AFP akan dilaksanakan Kemenkes di Kota Sorong, Papua Barat pada tanggal 5-8 November 2019.
- Rapat orientasi program imunisasi yang fokus pada eradikasi polio dan eliminasi campak rubella, dengan mengundang lembaga lintas-sektor dan DKP, akan dilaksanakan oleh Kemenkes di Depok, Jawa Barat pada 5-8 November 2019.
- Anggaran cMYP 2020-2024 sedang difinalisasi dengan menempatkan keberlanjutan respons KLB polio sebagai prioritas utama.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Kementerian Kesehatan Indonesia

Direktorat Surveilans dan Karantina. Email: poskoklb@yahoo.com
+62 877 7759 1097

#PHEOCIndonesia
+62878 0678 3906

WHO Indonesia

Dr Vinod Bura, Global Polio Eradication Coordinator. Email: burav@who.int
+62 812 8118 7429

UNICEF Indonesia

Dr Paul Pronyk, Chief, Child Survival & Development. Email: ppronyk@unicef.org



Kiri : Petugas imunisasi (Pak Hendrik Marisan) dari DKP Papua Barat memberikan penjelasan tentang backlog fighting untuk petugas imunisasi DKK saat pelatihan. Kredit: Aning Isfyandari/WHO Indonesia. Kanan: Validasi dan analisis imunisasi serta data surveilans VPD dilakukan oleh Kepala seksi surveilans dan imunisasi, petugas surveilans bersama konsultan WHO di DKK Merauke, Papua.